

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP EFEKTIVITAS  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA PANYADAP KECAMATAN  
SOLOKANJERUK KABUPATEN BANDUNG**

***THE INFLUENCE OF POLICY IMPLEMENTATION ON THE EFFECTIVENESS OF  
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN PANYADAP VILLAGE SOLOKANJERUK  
DISTRICT BANDUNG REGENCY***

**Pratiwi Aisyah<sup>1</sup>**

**Diani Indah<sup>2</sup>**

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana

pratiwiaisyah13@gmail.com

---

---

**ABSTRAK**

Permasalahan pada penelitian ini adalah belum efektifnya pembangunan infrastruktur di Desa Panyadap Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: Seberapa Besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Panyadap Terhadap Efektivitas Pembangunan Infrastruktur di Desa Panyadap Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung. Dalam menganalisis masalah yang diteliti, penulis mengajukan teori implementasi kebijakan dari George C Edwards III (dalam Subarsono 2011:90-92) dengan dimensi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap dan Struktur Birokrasi. Sedangkan teori efektivitas dari Duncan dalam Steers (2008:53) dengan dimensi yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka hipotesis yang dirumuskan yaitu: “Besarnya Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Pembangunan Infrastruktur di Desa Panyadap Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung yang ditentukan oleh pelaksanaan dimensi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap dan Struktur Birokrasi”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode ekplanatif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil pengujian terhadap hipotesis yang dirumuskan menunjukkan bahwa variabel implementasi kebijakan memiliki hubungan yang sedang dan signifikan antara Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Pembangunan Infrastruktur. Selain itu, ditemukan variabel lain yang ikut mempengaruhi efektivitas pembangunan infrastruktur yaitu variabel pengawasan. Dengan demikian hasil penelitian ini teruji secara empirik.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Efektivitas, Pembangunan.**

**ABSTRACT**

*The problem in this research is the ineffectiveness of infrastructure development in Panyadap Village, Solokanjeruk District, Bandung Regency. Based on these problems, the researcher formulated the problem as follows: How Big is the Influence of the Implementation of Panyadap Village Government Policies on the Effectiveness of Infrastructure Development in Panyadap Village, Solokanjeruk District, Bandung Regency. In analyzing the problems studied, the authors propose the theory of policy implementation from George C Edwards III (in Subarsono 2011: 90-92) with the dimensions of Communication, Resources, Disposition/Attitude and Bureaucratic Structure. While the theory of effectiveness from Duncan in Steers (2008:53) with dimensions namely Goal Achievement, Integration, and Adaptation. Based on this framework, the hypothesis formulated is: "The magnitude of the influence of policy implementation on the effectiveness of*

*infrastructure development in Panyadap Village, Solokanjeruk District, Bandung Regency, is determined by the implementation of the dimensions of Communication, Resources, Disposition/Attitude and Bureaucratic Structure". The research method used is an explanatory method with a quantitative approach. The results of testing the formulated hypothesis show that the policy implementation variable has a moderate and significant relationship between Policy Implementation and Infrastructure Development Effectiveness. In addition, another variable was found that also influenced the effectiveness of infrastructure development, namely the monitoring variable. This the results of this study tested empirically.*

**Keyword: Policy Implementation, Effectiveness, Development.**

## 1. Pendahuluan

Pemberian otonomi kepada desa yang seluas-luasnya berarti memberikan kewenangan kepada desa untuk dapat mengelola dan menggunakan sumber daya secara optimal guna menyeimbangkan pembangunan antara desa dan kota untuk kemajuan negara. Pemerintah desa dapat meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan sumber daya, serta kualitas dan efektivitas yang harus ditingkatkan.

Hakekat pembangunan desa ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun ekonomi. Selain itu, infrastruktur merupakan sistem yang sangat dibutuhkan sebagai suatu strategi dalam pembangunan pemerintah desa yang dimana hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi guna tercapainya stabilitas keamanan wilayah dinamis.

Sasaran pembangunan desa adalah pembangunan infrastuktur secara utuh dan merata. Sasaran tersebut mengandung makna bahwa tujuan akhir pembangunan adalah terwujudnya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun non material secara merata.

Tujuan pembangunan infrastruktur desa yaitu: Pertama, untuk meningkatkan

kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Kedua, meningkatkan pelayanan publik di desa. Ketiga, penanggulangan kemiskinan/penurunan angka kemiskinan. Keempat, menjadikan warga desa sebagai subyek pembangunan desa.

Kebutuhan infrastruktur di Indonesia memiliki cakupan yang sangat banyak baik fisik maupun sosial, terutama di daerah pedesaan yang masih tergolong minim dalam hal infrastruktur yang menghambat lajunya perkembangan kemajuan desa. Keteringgalan pembangunan infrastruktur yang berakibat kepada terbatasnya masyarakat dalam kegiatan-kegiatan perekonomian, terutama infrastruktur jalan karena infrastruktur jalan merupakan akses fisik ataupun sebagai penghubung dalam seluruh kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Desa Pasal 1 dijelaskan bahwa, Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dalam kurun waktu  $\pm$  5 tahun berjalan pemerintahan desa seiring dengan bertambahnya kewenangan dan besaran dana dari berbagai sumber, pemerintah Desa Panyadap telah banyak membangun infrastruktur yang berpedoman pada prinsip penataan kawasan. Implementasi prinsip tersebut adalah dikonsentrasikannya pembangunan pada satu titik wilayah baik itu RT, RW maupun dusun. Tentu ini sesuai kesepakatan terlebih dahulu yang disampaikan pada saat musyawarah desa. Ini ditujukan agar menjadi pemahaman bersama bahwa dalam membangun kita tidak bisa melakukannya secara parsial melainkan harus integral dan komprehensif.

Salah satu kendala dalam pembangunan di Desa Panyadap yaitu pembangunan infrastruktur yang masih belum maksimal. Dalam pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan yang kurang memadai dapat menghambat kegiatan dalam aspek ekonomi, karena jalan merupakan akses fisik atau penghubung dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan dapat menjadi sarana untuk memfasilitasi perekonomian daerah agar dapat tumbuh dan berkembang. Selain itu, pembangunan jalan usaha tani yang mengalami kerusakan sebelum jangka waktu yang ditentukan dan belum adanya perbaikan dari pemerintah desa. Artinya kondisi tersebut merupakan permasalahan-permasalahan yang perlu diatasi secara efektif dan efisien guna untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Panyadap Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung.

Selain data observasi awal yang peneliti lakukan diatas terdapat beberapa indikasi permasalahan belum efektifnya pembangunan infrastruktur di Desa Panyadap Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung antara lain:

1. Masih kurangnya pencapaian tujuan yang diharapkan oleh masyarakat mengenai pembangunan infrastruktur di Desa Panyadap Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung, sehingga dalam kesejahteraan masyarakat termasuk dalam perekonomiannya itu masih kurang.
2. Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga kontribusi dari masyarakat untuk menunjang program pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Panyadap Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung itu kurang.
3. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Panyadap untuk memantau dan melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur masih belum berjalan baik serta sarana dan prasarana yang kurang memadai juga menghambat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Konsep Implemmtasi Kebijakan**

Menurut Riant Nugroho D menjelaskan bahwa: “Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan public tersebut”.

Menurut Van Metter dan Carl van Horn dalam Agustino (2020:150), implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan individu, kelompok atau swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan berlangsung secara

linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Menurut Edwards III (dalam Subarsono 2011:90-92) yang mengemukakan bahwa: “Implementasi kebijakan sesungguhnya merupakan bagian dari keuntungan pengambilan keputusan diantara kebijakan yang sudah dibuat dan konsekuensinya terhadap masyarakat yang terkena dampak”. Dalam pendekatan masalah implementasi kebijakan Edwards III mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) factor apa saja yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) factor apa yang menjadi penghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dapat dirumuskan ada 4 (empat) yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat factor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi.

Suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai serta program tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan di evaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dapat dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.

## 2.2 Konsep Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang

telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Menurut Steer (2015:203) efektivitas adalah “mengerjakan sesuatu dengan akurat, tepat waktu, obyektif dan menyeluruh sesuai dengan tujuan organisasi. Setiap organisasi didirikan atau dibeintuk untuk mengejar efektivitas, karena eksistensi dan pertumbuhan yang bersangkutan dapat mengemban misi dan melaksanakan tugasnya dengan tingkat ketangguhan yang tinggi. Proses kerja sama sekelompok orang mencapai tujuan diperlukan organisasi sebagai wadahnya, dan untuk menggerakkan kerjasama tersebut diperlukan manajemen. Salah satu fungsi manajemen tersebut adalah pengawasan”.

Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

$$\text{Efektivitas} = (\text{Output Aktual} / \text{Output Target}) \geq 1$$

- Bila hasil perbandingan output aktual dengan output target  $< 1$  maka efektivitas tidak tercapai.
- Bila hasil perbandingan output aktual dengan output target  $\geq 1$  maka efektivitas tercapai.

Kriteria Efektivitas merupakan suatu kegiatan atau aktivitas dapat dikatakan efektif bila memenuhi beberapa kriteria tertentu. Efektivitas sangat berhubungan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, serta adanya usaha atau partisipasi aktif dari pelaksana tugas tersebut.

Konsep efektivitas adalah menunjukan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Efektivitas juga merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Jadi, sesuatu dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka sesuatu itu dikatakan berjalan dengan efektif dan efisien, artinya informasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan publik.

Dapat dilihat dari beberapa ukuran efektivitas suatu organisasi atau Lembaga, maka diperlukan tiga ukuran seperti yang disampaikan Duncan yang dikutip Steers (2008:53) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” untuk digunakan dalam penelitian ini dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Berikut penjelasan dari tiga ukuran tersebut sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pertahapan, baik dalam arti pertahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pertahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari tiga faktor yaitu:

- a. Kurun waktu pencapaiannya ditentukan
- b. Sasaran merupakan target yang kongkrit
- c. Dasar hukum

2. Integrasi

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan dari suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi

terdiri dari dua faktor yaitu prosedur dan proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi merupakan proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan yang terjadi dilingkungannya. Dalam adaptasi terdapat dua faktor yaitu peningkatan kemampuan serta sarana dan prasarana.

Dapat dikatakan bahwa efektivitas itu merupakan suatu target penyelesaian dengan waktu yang efisien dan pekerjaan yang dapat mencapai target secara terencana dan terstruktur dengan melihat ukuran-ukuran efektivitas.

### 3. Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan oleh peneliti ini mengacu pada penelitian kuantitatif dan jenis desain penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknik survei. Survei merupakan bagian dari desain penelitian yang dimana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara observasi secara faktual di lapangan dengan pengumpulan data yang akan dikonfirmasi kepada narasumber pada bidang yang dikaji, sehingga dengan adanya data survei yang telah diperoleh dan dikonfirmasi kepada narasumber, maka data hasil penelitian dalam teknik survei dapat ditemukan tingkat permasalahan yang terjadi.

Dalam penelitian survei, peneliti menanyakan ke beberapa orang (responden) tentang keyakinan, pendapat, karakteristik suatu obyek dan perilaku yang telah lalu atau sekarang untuk mengukur nilai beberapa variabel, menguji beberapa hipotesis tentang perilaku, pengalaman dan karakteristik suatu obyek. Penelitian survei pada umumnya adalah penelitian korelasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini yaitu metode survei eksplanatif. Metode ini adalah metode

penelitian yang dapat menghubungkan antara kajian mengenai sebab dan akibat antara dua fenomena atau bisa lebih, bentuk sebab akibat dari proses penelitian ini adalah adanya suatu bentuk implementasi kebijakan yang dapat mempengaruhi terhadap efektivitas pembangunan infrastruktur desa.

Dengan adanya kedua variabel tersebut, maka dapat ditentukan adanya pengaruh dan kesesuaian antara sebab akibat dari adanya implementasi kebijakan dalam meningkatkan efektifitas pembangunan infrastruktur desa, sehingga dengan adanya kajian tersebut dapat menentukan tingkat keberhasilan yang didapat dari adanya variabel penelitian.

Sumber data adalah salah satu bagian terpenting dari proses penelitian, hal ini dikarenakan sumber data merupakan ujung sumber dalam menentukan informasi dan tingkat kepastian dari proses penelitian. Sumber data yang ditentukan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu:

1. Sumber data primer adalah responden atau objek penelitian yang langsung. Data primer ini bisa didapatkan melalui kuisisioner, wawancara, ataupun survei.
2. Sumber data sekunder adalah data yang diambil dari sumber data lain seperti dari buku, dokumen-dokumen, situs, dll.

Teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan:

1. Teknik observasi: Teknik ini yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara menentukan kejadian-kejadian yang terjadi pada saat proses penelitian dan juga dapat dilakukan dengan menentukan perbandingan data yang didapat saat proses penelitian dengan kajian penelitian.

2. Teknik wawancara: Teknik ini dilakukan dengan cara wawancara untuk mendapatkan jawaban dari narasumber. Proses penelitian ini antara lain: Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan pihak aparaturnya.
3. Teknik Penyebaran Angket: Teknik ini dilakukan dengan menyebarkan angket berupa pertanyaan secara tertulis yang berdasarkan dengan data-data yang diperlukan untuk penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan jawaban berupa penilaian dari narasumber yang memiliki angka untuk dijadikan nilai dalam melakukan pengukuran terhadap suatu pertanyaan.

#### 4. Hasil Penelitian

##### 4.1 Uji Validitas

Untuk mengukur kevalidan dari suatu instrument maka peneliti menguji validitas terlebih dahulu. Validitas ini merupakan suatu pengukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu instrumen (sebagai alat ukur). Suatu instrumen dapat dikatakan valid apabila instrument tersebut mampu mengukur apa yang diinginkan, sehingga dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat.

Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa hasil validitas untuk variabel implementasi kebijakan dengan 8 (delapan) pernyataan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

##### Uji Validitas Variabel Implementasi Kebijakan (Variabel X)

Pernyataan	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Kesimpulan
1	0,418	0,1764	VALID
2	0,433	0,1764	VALID
3	0,522	0,1764	VALID
4	0,431	0,1764	VALID
5	0,608	0,1764	VALID

6	0,662	0,1764	VALID
7	0.499	0,1764	VALID
8	0,401	0,1764	VALID

Sumber: Pengolahan Data Kuisisioner Dengan SPSS V.25

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dalam kuisisioner variabel X yaitu implementasi kebijakan yang memiliki nilai hitung lebih besar daripada nilai r tabel 0,1764 dari jumlah responden 123 orang. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel implementasi kebijakan (variabel X) terbilang sudah valid.

Sedangkan untuk hasil validitas pada variabel Efektivitas Pembangunan Infrastruktur menunjukkan seluruh indikator sebanyak 6 (enam) pernyataan sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Uji Validitas Variabel Efektivitas**  
**(Variabel Y)**

Pernyataan	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Kesimpulan
1	0,674	0,1764	VALID
2	0.657	0,1764	VALID
3	0,685	0,1764	VALID
4	0,685	0,1764	VALID
5	0,702	0,1764	VALID
6	0,713	0,1764	VALID

Sumber: Pengolahan Data Kuisisioner Dengan SPSS V.25

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dalam kuisisioner variabel Y yaitu variabel Efektivitas memiliki nilai hitung yang lebih besar daripada nilai r tabel 0,1764 dari jumlah responden 123 orang. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel Efektivitas (Variabel Y) terbilang sudah valid.

#### 4.2 Uji Reabilitas

Reabilitas berkaitan dengan pengertian suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data (dapat juga mengukur

variabel) karena instrumen tersebut sudah baik. Suatu instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data (ukuran) yang sama. Menurut Ghozali (2016:47) Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu koefisien yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Koefisien dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dalam penelitian menggunakan bantuan software SPSS dengan kriteria bahwa variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* >0,70 (Ghozali, 2016:48).

Untuk uji reabilitas hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.3**  
**Uji Reabilitas**

Variabel	Nilai r Kritis	Nilai r Tabel	Kesimpulan
X	0,714	0,700	Reabilitas Kuat
Y	0,841	0,700	Reabilitas Kuat

Sumber: Pengolahan Data Kuisisioner Dengan SPSS V.25

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa kedua nilai r kritis variabel masing-masing yaitu variabel Implementasi Kebijakan (variabel X) dan variabel Efektivitas (variabel Y) memiliki reabilitas yang kuat, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh pernyataan pada kedua variabel masing-masing memiliki reabilitas yang kuat.

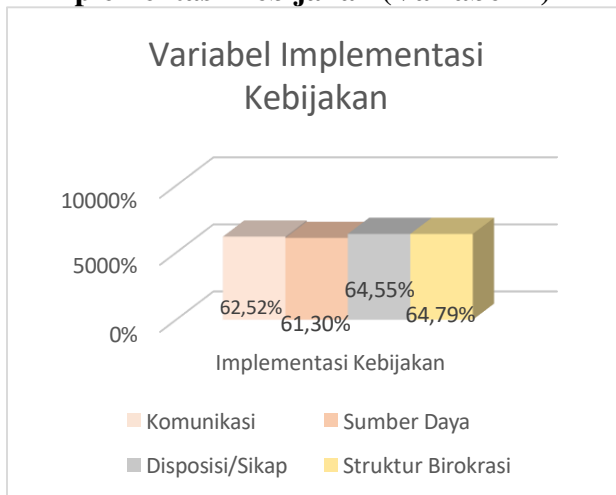
#### 4.3 Analisis Deskriptif Variabel Implementasi Kebijakan

Dalam penelitian ini , peneliti mencoba untuk menentukan variable implementasi kebijakan (variable X) yang mengacu kepada pendapat George C. Edward III (dalam Subarsono, 2011:90-92)

berpandangan bahwa dalam mengukur implementasi kebijakan itu dipengaruhi oleh 4 (empat) dimensi yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap, dan Struktur Birokrasi dengan mengajukan sebanyak 8 (delapan) indikator pernyataan yang dicantumkan dalam sebuah kuisisioner dengan masing-masing 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih oleh responden dan dianggap sesuai dengan realita yang dirasakan oleh responden.

Untuk mengetahui hasil jawaban variabel (X) secara keseluruhan, dapat digambarkan dalam bentuk diagram batang terlihat hasil penelitian secara keseluruhannya sebagai berikut:

**Gambar 4.2**  
**Rekapitulasi Deskriptif Variabel Implementasi Kebijakan (Variabel X)**



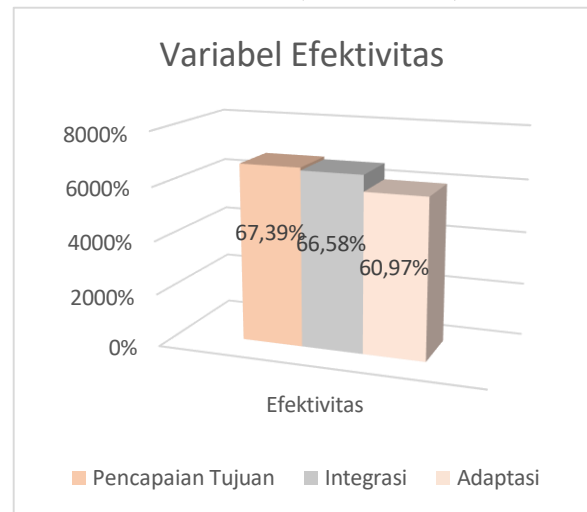
Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan bahwa dari 4 (empat) dimensi yang diajukan oleh peneliti untuk variabel implementasi kebijakan atau variabel (X) pada dimensi pertama yaitu dimensi Komunikasi sebesar 62,52%, dimensi kedua yaitu Sumber Daya dengan persentase sebesar 61,30%, dimensi ketiga yaitu Disposisi/Sikap dengan persentase sebesar 64,55% dan terakhir dimensi Struktur Birokrasi yaitu sebesar 64,79%. Pengaruh paling besar yaitu berada pada dimensi Struktur Birokrasi dengan persentase sebesar

64,79% dan yang paling kecil yaitu dimensi Sumber Daya sebesar 61,30%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kriteria pengukuran dengan menggunakan persentase keseluruhan apabila dirata-ratakan menghasilkan sebesar 63,29%. Artinya Pemerintah Desa Panyadap sudah cukup melaksanakan dimensi-dimensi implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C Edward III (dalam Subarsono 2011:90-92) dengan pengukuran yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap dan Struktur Birokrasi.

**4.4 Analisis Deskriptif Variabel Efektivitas**

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menentukan variabel Efektivitas (variabel Y) yang disampaikan oleh Duncan dalam Steers (2008:54) mengungkapkan bahwa efektivitas terdiri dari 3 (dimensi) yaitu: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi dengan menguji melalui 6 (enam) indikator. Untuk mengetahui hasil jawaban secara keseluruhan untuk variabel (Y) digambarkan dalam diagram batang akan terlihat hasil penelitian secara keseluruhan sebagai berikut :

**Gambar 4.3**  
**Rekapitulasi Deskriptif Variabel Efektivitas (Variabel Y)**





Berdasarkan hasil dari repatulasi diagram batang di atas, menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) dimensi yang diajukan untuk Efektivitas pembangunan infrastruktur, pada dimensi pertama yaitu dimensi Pencapaian Tujuan mendapatkan persentase paling tinggi yaitu sebesar 67,39%, dimensi kedua yaitu Integrasi mendapatkan persentase sebesar 66,58% dan ketiga dimensi Adaptasi mendapatkan nilai yang paling kecil sebesar 60,97%. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan kriteria pengukuran persentase keseluruhan yang apabila dirata-ratakan menghasilkan sebesar 60,97%. Artinya masyarakat di Desa Panyadap ini masih belum mendapatkan pembangunan infrastruktur yang maksimal dari pemerintah desa Panyadap Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung.

Sesuatu dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka sesuatu itu dikatakan berjalan efektif dan efisien. Duncan dalam Steers (2008:54) berpendapat bahwa pada dasarnya ada beberapa hal yang perlu dipenuhi dalam efektivitas kebijakan, yaitu: Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi.

#### 4.5 Analisis Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas

Analisis ini dilakukan untuk menentukan besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, yakni Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Pembangunan Infrastruktur.

Pada hasil perhitungan yang peneliti gunakan melalui SPSS V.25 dapat diperoleh nilai koefisien regresi ( $\beta$ ) untuk setiap variabel dalam penelitian ini. Nilai ( $\beta$ ) ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.17**  
**Coefficients**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.869	1.671		1.717	.089
	Jumlah X	.638	.063	.676	10.093	.000

a. Dependent Variable: Variabel Y

Sumber: data hasil SPSS V.25

$$Y = 2.869 + 0.638 X$$

Adapun nilai interpretasi dari persamaan regresi sederhana diatas yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas pembangunan infrastruktur di Desa Panyadap bernilai sebesar 2.869 satuan pada Implementasi Kebijakan Sebesar 0
2. Setiap Implementasi Kebijakan meningkat 1 satuan, maka Efektivitas pembangunan infrastruktur di Desa Panyadap meningkat 0.638 satuan.

Selanjutnya, untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel terikat terhadap variabel bebas, maka dilakukan dengan pengujian koefisien determinasi untuk mencari  $r^2$  secara verbal. Nilai  $r^2$  digunakan untuk mengukur proporsi atau presentase variable total dalam variabel bebas (Y) yang dijelaskan oleh variabel terikat (X). Dalam penelitian ini, nilai  $r^2$  menunjukkan besarnya pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Pembangunan Infrastruktur. Peneliti menggunakan bantuan SPSS V.25, dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

**Tabel 4.18**  
**Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.676 <sup>a</sup>	.457	.453	3.09920
a. Predictors: (Constant), Variabel X				

Sumber: Data hasil SPSS V.25

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai  $r^2$  adalah sebesar 0,457 sehingga dapat diartikan bahwa Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Pembangunan Infrastruktur di Desa Panyadap adalah sebesar 45,7%. Sedangkan besarnya pengaruh lain yang tidak diteliti yaitu sebesar 54,3%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Pembangunan Infrastruktur di Desa Panyadap Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung.

### 5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mendapatkan kesimpulan yaitu berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dengan dimensi-dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi telah memberikan pengaruh yang sedang terhadap efektivitas pembangunan infrastruktur di Desa Panyadap Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung. Maka dengan demikian pengujian hipotesis yang diajukan teruji secara empirik.

### PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Edwards, G. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Texas A & M University, Congressional Quarterly Press.
- Gibson, James, L; John. M. Ivamcevich dan J.H Donelly, 2013. *Manajemen, Perilaku, Struktur, Proses*. Terj. Djoerban Wahid. Jakarta: Erlangga.
- Muchlis, H. (2014). *Kebijakan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mulyadi, D. (2015). *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, R. (2004). *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy*. Jakarta: PT Gramedia.
- Siagian, S. (2016). *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Steers, R. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: LPPM dan Erlangga.
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suparno, A. (2001). *Membangun Kompetensi Belajar*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi: Departemen Pendidikan Nasional.
- Tangkilisan, H. N. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Tarigan, A. (2000). *Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial*. Jawa Barat.